

BABI PENDAHULUAN

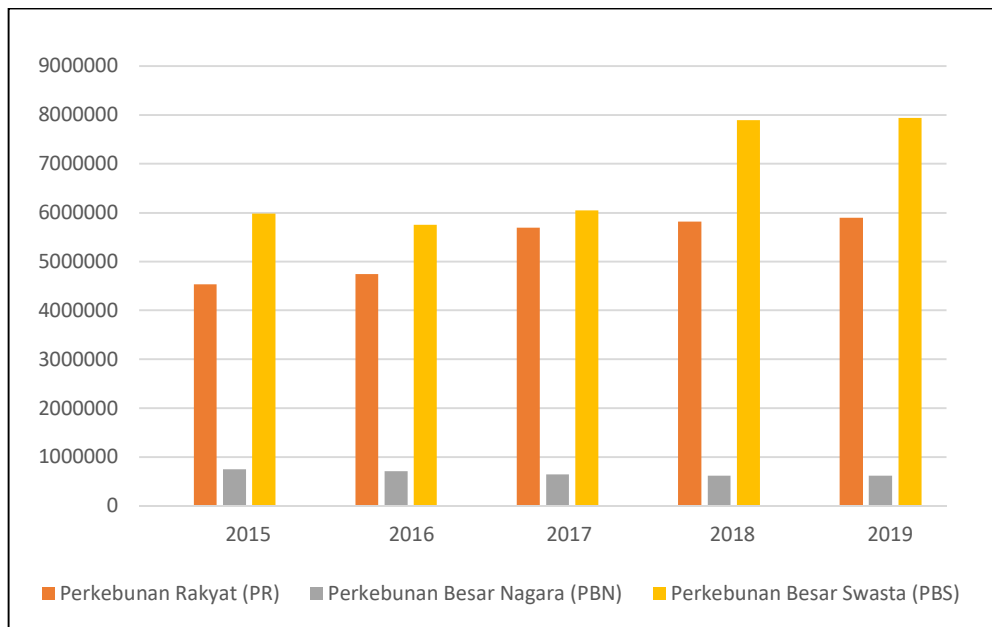
A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif untuk mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Pembangunan tidak hanya strategi yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, namun juga pertumbuhan dan kesempatan kerja, pemerataan, penekanan pada kebutuhan dasar (*basic need approach*), lingkungan hidup serta pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Indonesia sebagai negara agraris dengan mata pencarian utama disektor pertanian dan sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan perlu mendapatkan porsi pembangunan yang lebih baik guna memangkas kesenjangan pembangunan dengan perkotaan. Pembangunan wilayah meliputi aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah (Mahi, 2016).

Sasaran program pembangunan wilayah pedesaan adalah meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi keluarga petani sehingga mereka mendapatkan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan petani menjadi penting disini karena lebih dari 60% penduduk Indonesia ber mata pencarian di sektor pertanian (Jayadinata dan Pramandika, 2006).

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu aktivitas pertanian masyarakat di pedesaan. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di Indonesia. Kelapa sawit mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (UU Nomor 39 tahun 2014). Pengembangan kelapa sawit akan mendorong berkembang dan tumbuhnya kegiatan ekonomi lain yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut BPS (2020), luas perkebunan sawit di Indonesia mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015 luas perkebunan kelapa sawit mencapai 11.260.276 ha dengan rincian 4.535.400 ha Perkebunan Rakyat (PR), 743.894 ha Perkebunan Besar Negara (PBN), dan 5.980.982 ha Perkebunan Besar Swasta (PBS). Sementara pada tahun 2019 luas perkebunan kelapa sawit telah mencapai 14.456.612 ha dengan rincian 5.896.775 ha Perkebunan Rakyat (PR), 617.501 ha Perkebunan Besar Negara (PBN), dan 7.942.336 ha Perkebunan Besar Swasta (PBS).



Gambar 1. Luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia menurut status pengusahaan (ha).

Di Provinsi Sumatera Barat perkebunan kelapa sawit terutama perkebunan rakyat terus mengalami perkembangan dimana luas perkebunan rakyat pada tahun 2019 mencapai 221.669,10 ha (angka sementara) dibandingkan tahun 2018 seluas 220.193,10 ha (Sumatera Barat Dalam Angka 2020). Namun sebagian besar kelapa sawit telah memasuki usia tidak produktif dimana akan mempengaruhi jumlah dan kualitas produksi. Dengan demikian perlu dilakukan upaya mempertahankan dan meningkatkan produksi guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurut data Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2020, Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten yang mengusahakan kelapa sawit terbesar ke-3 setelah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir

Selatan (Lampiran 1). Di Kabupaten Dharmasraya perkebunan kelapa sawit didominasi oleh perkebunan rakyat, dimana terjadi peningkatan luas tanaman dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 luas perkebunan kelapa sawit adalah 30.296 ha menjadi 32.263 ha di tahun 2018 (Lampiran 2).

Di Kabupaten Dharmasraya perkebunan kelapa sawit telah mulai diusahakan sejak akhir tahun 1980-an oleh perkebunan besar dan perkebunan rakyat berkembang pada tahun 1990-an. Dengan demikian sebagian besar tanaman kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya saat ini berada pada tahap akhir siklus produksi -bahkan lebih- sehingga perlu dilakukan upaya agar produksi tetap terjaga bahkan ditingkatkan. Perkebunan besar kelapa sawit sudah melaksanakan replanting mulai tahun 2014 sedangkan perkebunan rakyat sampai tahun 2018 belum melaksanakan replanting.

Pada konteks pembangunan daerah, upaya untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan harus dilakukan secara terintegrasi sebagai program pembangunan daerah dan terkoordinasikan kepada semua *stakeholders* (pemerintah/instansi teknis terkait, perusahaan perkebunan kelapa sawit, pedagang /eksportir, dan petani / kelompok tani kelapa sawit). Salah satu upaya tersebut dan saat ini sudah tepat waktunya adalah program peremajaan (*replanting*) terhadap tanaman yang sudah melewati usia optimal untuk produksi karena sudah tua. *Replanting* juga dapat dilakukan untuk tanaman yang tidak produktif atau rusak (Syarfi, *et.al.* 2019a dan 2019b). Peremajaan Kelapa Sawit adalah penggantian tanaman tua (sekitar 25 tahun), tanaman rusak maupun tanaman tidak produktif dengan produktivitas dibawah 13 ton/ha/tahun -yang mengakibatkan keuntungan yang diperoleh petani menurun- dengan tanaman baru. Tujuan peremajaan kelapa sawit adalah untuk meningkatkan produktivitas, menjamin keberlanjutan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekebun. Menurut Sutarta *et al.* (2008), peremajaan kelapa sawit sebagai inovasi mengembalikan produktivitas menawarkan 4 (empat) sistem peremajaan yang dapat dilakukan di Indonesia yaitu sistem tumbang serentak (konvensional), sistem *underplanting*, sistem tumpang sari dan sistem peremajaan bertahap.

Secara nasional program meremajakan kelapa sawit telah menjadi perhatian pemerintah yang didukung dengan kebijakan bantuan dana hibah *replanting* yang

menggunakan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Pelaksanaan *replanting* di Kabupaten Dharmasraya sudah diajukan Koperasi dan kelompok tani pada tahun 2017 dan mulai terealisasi pada tahun 2018. Peremajaan kelapa sawit merupakan kegiatan utama yang menentukan keberhasilan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan (petani, penyuluh, perkebunan, LSM dan perguruan tinggi) untuk mendukung kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Khusus dukungan pemerintah daerah diperlukan dengan memfasilitasi, mengawasi dan mendampingi pelaksanaan peremajaan kelapa sawit rakyat. Para petani masih perlu diberikan pemahaman dan dorongan untuk menyadari pentingnya perencanaan dan pelaksanaan peremajaan (Syarfi, *et.al.* 2019c).

Peremajaan kelapa sawit melalui Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang diluncurkan mulai tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Perkebunan no: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang pedoman peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit. Program melalui insentif pendanaan ini diharapkan dapat membantu pembiayaan petani dalam meremajakan kelapa sawitnya yang sudah tua dan tidak produktif lagi. Sasaran program adalah petani swadaya yang tergabung dalam kelompok tani atau koperasi.

Sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur Jendral Perkebunan no: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tersebut dijelaskan bahwa teknis peremajaan pada program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No: 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang pedoman peremajaan perkebunan kelapa sawit. Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, saat ini progres kegiatan replanting pada program peremajaan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) mencapai 1.717 Ha yang terdiri atas 7 (tujuh) kelompok tani dan 3 (tiga) koperasi (KUD) yang tersebar di 4 kecamatan, dimana 4 (empat) kelompok tani diantaranya telah melaksanakan peremajaan kelapa sawit dengan luas 341 Ha (Lampiran 3).

Sistem peremajaan yang disyaratkan program BPDP-KS adalah sistem tumbang serempak (konvensional). Selain itu dalam pelaksanaan program mesti

menerapkan teknis peremajaan sesuai aturan dan pedoman peremajaan. Secara teknis sistem konvensional memberikan keuntungan karena pengolahan tanah dapat dilakukan lebih intensif dan dapat menyediakan media tanam yang lebih ideal bagi tanaman, namun penumbangan tanaman secara menyeluruh akan menghentikan produksi kebun dan mempengaruhi perekonomian keluarga petani. Dibandingkan sistem peremajaan yang lain, sistem peremajaan kelapa sawit tumbang serempak (konvensional) dinilai cukup memberatkan bagi petani. Penerapan ini adalah pertama kali dilakukan oleh petani dalam usaha memperbaiki produktivitas kebun. Pada akhirnya akan memunculkan pandangan atau persepsi bagi petani pelaksana terkait peremajaan kelapa sawit yang mereka dilakukan. Persepsi petani terhadap peremajaan kelapa sawit BPDP-KS menjadi penting karena persepsi petani merupakan sebagai bentuk *feedback* dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit BPDP-KS dalam upaya pemerintah membangun dan memperkuat sektor perkebunan di wilayah pedesaan. Selain itu persepsi petani terhadap pelaksanaan peremajaan kelapa sawit BPDP-KS diperlukan untuk melihat sejauh mana teknik tumbang serempak (konvensional) diinterpretasikan oleh petani baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Peremajaan yang telah dilaksanakan membuat petani memiliki pandangan dan penilaian tersendiri yang dapat mempengaruhi pola pikir mereka dan petani lainnya.

Peremajaan kelapa sawit seharusnya telah dilakukan secara menyeluruh, untuk keberlanjutan produksi kelapa sawit, namun hanya sebagian kecil petani yang melakukannya. Keberlanjutan produksi kelapa sawit rakyat dilaksanakan dengan pemberdayaan petani beserta kelembagaannya (kelompok tani dan koperasi) dalam kegiatan peremajaan disamping membangun perkebunan kelapa sawit rakyat sesuai dengan standar pembangunan berkelanjutan yaitu ISPO (Syarfi dkk, 2019c).

Walaupun program peremajaan perkebunan kelapa sawit melalui dana BPDP-KS ini memberikan insentif pendanaan dalam pelaksanaan peremajaan tetap saja memunculkan permasalahan bagi petani. Diantara permasalahan yaitu ketakutan kehilangan mata pencarian utama atau *discontinue* pendapatan dalam masa tunggu menjadi suatu yang sulit bagi petani mengingat sistem peremajaan kelapa sawit yang disyaratkan adalah sistem penumbangan serempak (konvensional). Dengan demikian petani dituntut beradaptasi dengan aturan teknis

tersebut dimana petani belum terbiasa melakukannya dan menemukan solusi atas permasalahan peremajaan kelapa sawit ini.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan kajian tentang **“Analisis Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya (Studi kasus Petani Penerima Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS))”**.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas beberapa permasalahan yang perlu dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan peremajaan kelapa sawit melalui dana BPDP-KS di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimana persepsi petani kelapa sawit yang melaksanakan peremajaan kelapa sawit melalui dana BPDP-KS di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya terhadap peremajaan kelapa sawit?
3. Apa permasalahan dan strategi petani dalam menghadapi kendala pada peremajaan kelapa sawit dengan menggunakan dana BPDP-KS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit melalui dana BPDP-KS di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
2. Menganalisa persepsi petani kelapa sawit yang melaksanakan peremajaan kelapa sawit melalui dana BPDP-KS di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya terhadap peremajaan kelapa sawit.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan strategi petani dalam menghadapi kendala pada peremajaan kelapa sawit dengan menggunakan dana BPDP-KS.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis manfaat penelitian ini adalah menambah pengetahuan terhadap program peremajaan kelapa sawit dan sebagai penerapan sebagian ilmu yang didapat.
2. Manfaat teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah penelitian serta dapat dijadikan referensi dalam upaya membangun cara pandang petani terhadap inovasi dan teknis peremajaan kelapa sawit yang baik.
3. Manfaat praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi *stakeholders* dalam perumusan kebijakan yang tepat dalam pembangunan perkebunan, dimana tidak hanya menumbuhkan persepsi positif petani terhadap inovasi atau terobosan baru dalam revitalisasi perkebunan khususnya peremajaan kelapa sawit, namun juga menumbuhkan upaya penerapan teknis budidaya yang tepat dan sesuai anjuran dapat dilakukan oleh petani dan menjadi suatu keharusan.

